

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhar, Muhamad. *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. (Semarang: Pustaka Magister, 2019)
- A.Yani. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif: Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: KonstitusiPress (Konpress), 2013)
- Asshiddiqie, J.. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
- Atmosudirjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- H.S, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2017)
- Harsono, Boedi. *Hukum Pertambangan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017).
- K. Sirin, b. Sholeh. *Ormas Islam Dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Kurnia, Titon Slamet dkk. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*,. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Liberty, 2016).
- R.Subekti. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha 1969).
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII press, 2004).
- Satrio, J. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Sigit, Sutarjo. “*Perkembangan Pertambangan di Indonesia*”, Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas, Yayasan Krida Caraka Bumi, Dept. Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sumardi, Dedi. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, bahan ajar ilmu Hukum di FH Universitas Indonesia, 1977, Jakarta, 17.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Prizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- T.,Alw, L. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020)
- Ter Haar Bzn, Mr, “*Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*”, (Jakarta: Pradnya Paramitha 1974).
- Teuku H.Moehammad Hasan. *Sejarah Perjuangan Perminyakan Nasional* (Jakarta: Yayasan sari pinang Sakti, 1985).
- Tjiptadi Soedarjono,Jogi “*Hukum Pertambangan*”, bahan ajar Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Utama, I Made Arya. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2010).
- Winayanti, Nia Kania. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ufuk Press, 2006).
- Yonahes,Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. (Jakarta: Grasindo, 2009)

Jurnal

- Azhar,Muhamad. “Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro.” *Administrative Law & Governance*, Vol.1, (No.1), 2018 pp.5-6
- Azhar, Muhamad, & Suhartoyo. “Aspek Hukum Kebijakan Geothermal Di Indonesia”. *Law Reform*, Vol.11, (No.1) 2015, p.5
- Azhar,Muhamad. “Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo”., *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No 1, 202. 121-135.

- Azhar, Muhamad., Suharso, Putut., Ispriyarso, Budi., Purnomo, Agus., Suhartoyo., & Sukirno. *Building an Integrated Mining Licensing System in Order to Preserve the Environment in Indonesi. E3S Web of Conferences*, Vol.68, p.3.2018
- Azhar, Muhamad., Solechan., Saraswati, Retno., Suharso, Putut., Suhartoyo., & Ispriyarso, Budi. *The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security. E 3S Web of Conferences* . Vol 68, p.10. 2018.
- Cahyani, A. A. F. “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertimbangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11), 2023 1–17. <https://jhlrg.rewangrencang.com>.
- Cahyani, Adinda Agis Fitria. “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Potential,” : : *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 11 (2024): 1–17, <https://jhlrg.rewangrencang.com>.
- E.Simanjuntak, Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Fadil, Muhammad Rizal Fadil. Izin Usaha Pertambangan, *Univesitas Sriwijaya, Palembang*, 2019.
- Faradila, Hemi. “Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah)”, *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol.11, No.3 (Juli-September 2020).
- Fatimah, Anggun Nadia, Kholik, Abdul, Wina Puspita Sari, Raisa Rahmi Alfat, Putri Yohana Sitorus. (2023). “Peran dan Fungsi Praktisi Hubungan Masyarakat di Organisasi Nirlaba”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6).
- Fauzi, Gamawan. “Urgensi UU Ormas dalam memperkokoh NKRI”, *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI*, No. 29, Maret 2015.
- H.Tiara, & Zuhri, M. “Mekanisme Pemeriksaan Dalam Persidangan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung.” *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*: Vol. 1, No. 2, November 2017.

- Hanafi, Syawaluddin. "Problematika Hukum Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi masyarakat", *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- Haris, Oheo K. "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan", *Yuridika*, Vol.30, No.1 (2015).
- Hasbi, Saupi et al., "Analisis kebijakan izin tambang bagi organisasi masyarakat dalam aspek konstitusional dan politik" 07, no. 1 (2025).
- Hidayat, Arief. "Kebijakan Pertambangan dalam Konteks Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 2018.
- Irfani, Nurfaqih Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
- Kurniawan, I. G. A., Samsithawrati, P. A., & Lulo, lourenco de D. M. "Eksistensi Sanksi Administrasi Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analyzsis of Law". *Jurnal Ius Constituendum* , 8(1), 2023, 115–131. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.
- Kurniawan, M. Beni. "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945," *Jurnal Konstitusi*, 15, no. 3 (2018).
- Mahdi, "Pembubaran Ormas Radikal dalam Perspektif Perundang-undangan Kajian 5 Khusus Perppu No. 02 Tahun 2017", *Jurnal Nuansa* Vol. X, Nomor 2, Desember 2017.
- Nurnaningsih Rachman, Sri dan Tuggati, Melki T. "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan," *the Juris* VIII, no. 1 (2024): 349–65, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Phahlevy, Rifqi Ridlo. "Transformasi Peran Ormas Dalam Konstruksi Penegakan Hukum Di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

- Phillip Eldridge, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?*, (Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1989).
- Prasetyo, M. A., Supriyadi, Sediati, D. S. R., & Arifin, Z. “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana”. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 2021 905–918. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237> .
- Prayoga, Dimas. “Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kota Pontianak)”, *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol 1, No 1, 2017.
- Redi, Ahmad, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, 104.
- Sholahuddin, T., & Maksum, M. N. R. “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2). 2024.
- Soedarjono, Jogi Tjiptadi,. “Kontrak Production Sharing sebagai landasan kegiatan Eksplorasi/Eksploitasi Minyak di lepas pantai”, FH UI, 1984.
- Soedarjono, Jogi Tjiptadi. “Mineral Policy” suatu Pendekatan baru dalam rangka Pelaks. Kedaulatan Ne-gara dan Hak Eksklusif di Landas Kontinen”, Ranc. Disertasi, S-3 Hukum UNDIP, Semarang, 2003.
- Wibowo, Catur Wibowo dan Harefa, Herman. “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah”, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7, No. 1, Edisi Maret 2015.
- Winata, Muhammad Reza. “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18, no. 4 (2018).
- Yazid, Ferdian Yazid (2020). “Keleluasaan bagi Korporasi di Sektor Ekstraktif: Tantangan terhadap Agenda Penguatan Akuntabilitas Korporasi Tambang. Dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia”. Jakarta: Universitas Paramadina.

Zulham, Effendy Harahap. "Madiasa Ablisar, dan Jusmadi Sikumbang, Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanpa Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Deli Serdang", *USU Law Journal*, Vol.5, No.2 (2017).

Artikel

Lihat "Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi", <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024

Marfugah, L. (2024). Diskursus Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan oleh Ormas. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskursus-kepemilikan-izin-usaha-pertambangan-oleh-ormas-lt66cb72361463c/>.

Republika, E. (2024, Juli 25). Pengamat: Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan Menyalahi UU Minerba. Diambil kembali dari www.ekonomi.republika.co.id:https://ekonomi.republika.co.id/berita/sek6ek423/pengamat-izin-kelola-tambang-untuk-ormas-keagamaan-menyalahi-uu-minerba

Rilo Pambudi. (2024). "Publik Ragu soal Kapasitas Pengelolaan Tambang, Ketum PBNU: Kita Sudah Punya Kapasitas Profesional Untuk Itu, Ga Percaya?", <https://www.tvonenews.com/ekonomi/218574-publik-ragu-soal-kapasitas-pengelolaan-tambang-ketum-pbnu-kita-sudah-punya-kapasitas-profesional-untuk-itu-ga-percaya?page=all>, diakses pada tanggal 25 Januari 2025

T. Ade Surya. (2024). "Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan", https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf, diakses pada tanggal 25 Januari 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi